

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA FIKIR DAN PARADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Tinjauan Historis

Tinjauan historis adalah tinjauan tentang masa lalu mengenai manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran juga penjelasan yang memberikan pengertian dan pemahaman tentang apa yang telah berlalu.

Tinjauan historis memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelidikan ataupun penelitian terhadap gejala peristiwa masa lampau manusia baik individu atau kelompok beserta lingkungan yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis meliputi urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah lampau (kronologis) dengan tafsiran dan penjelasan yang mendukung serta memberi pengetahuan terhadap gejala peristiwa tersebut. (<http://wikipedia.org/wiki/sejarah/11-08-2013>).

Sejarah menurut Moh. Yamin dalam buku karangan Husin Sayuti, adalah ilmu pengetahuan pada umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarich tentang kejadian dalam masyarakat pada waktu yang lampau sebagai hasil penyelidikan bahan-bahan atau tanda-tanda yang lain (Husin Sayuti, 1974:1).

Sedangkan menurut Nevis dalam buku Metode Penelitian, mengemukakan bahwa Sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang

ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran (Moh. Nazir, 2009:48).

Sejarah menurut Mohammad Ali dalam Hugiono dan PK. Poerwantana adalah :

- 1) Jumlah perubahan-perubahan, kejadian dan peristiwa dalam kenyataan sekitar kita
- 2) Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian dan peristiwa dalam kenyataan sekitar kita
- 3) Ilmu yang bertugas perubahan-perubahan, kejadian dan peristiwa dalam kenyataan sekitar kita (Hugiono dan PK. Poerwantana, 1992 : 2).

Adapun manfaat belajar sejarah antara lain :

- 1) Memberikan pelajaran bahwa kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau yang dapat kita jadikan pelajaran, sehingga hal yang buruk dapat kita hindari.
- 2) Memberikan ilham bahwa tindakan kepahlawanan dan peristiwa gemilang di masa lampau dapat mengilhami kita semua pada taraf perjuangan sekarang serta peristiwa besar akan memberikan ilham besar pula.
- 3) Memberikan kesempatan, bahwa kita dapat terpesona oleh suatu roman yang bagus dengan sendirinya kita berhasil mengangkat aspek seni (Nugroho Notosusanto, 1964: 17).

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang dialami oleh manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberikan tafsiran dan analisis secara kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

2.1.2 Konsep Militer

Menurut Amos Perlmutter, militer adalah :

“Sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Militer adalah suatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada situasi hirarki birokrasi” (Amos Perlmutter, 2000:2).

Atas dasar diatas maka militer merupakan sebuah institusi dan komponen yang melayani kepentingan umum, dan dalam hal ini mereka bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara.

“Abdul Fattah menyatakan bahwa peran militer adalah sebagai alat negara yang menjaga keutuhan dan kedaulatan negara untuk mensejahterakan kehidupan bangsa” (Abdul Fattah, 2005:41).

Hal ini berarti bahwa militer memiliki peran sebagai alat pertahanan keamanan yang menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dari ancaman serta gangguan dari bangsa dan negara lain, termasuk adanya pergolakan dan pemberontakan.

Menurut M.D.La Ode, Militer versi Indonesia adalah terdiri dari :

- a. TNI Angkatan Darat yang mengemban tugas khusus untuk mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Wilayah daratan.
- b. TNI Angkatan Laut yang mengemban tugas khusus untuk mengawal kedaulatan NKRI di wilayah lautan.
- c. TNI Angkatan Udara untuk mengemban tugas khusus sebagai pengawal kedaulatan NKRI dari segala bentuk AGTH (Ancaman, Gangguan, Tantangan dan Hambatan) yang berasal dari dalam maupun dari luar (M.D.La Ode, 2006:24).

Selanjutnya M.D.La Ode mengatakan bahwa:

Penamaan ABRI dalam organisasi Militer Indonesia berlangsung sampai tahun 1998, yang terdiri dari TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan POLRI. Pada tahun 1998 sampai saat ini, sebutan ABRI untuk institusi militer tidak lagi digunakan melainkan mempergunakan nama TNI untuk menyebut organisasi militer Indonesia. Kebijakan penggunaan nama TNI, karena POLRI secara resmi telah dikeluarkan dari ABRI (M.D.La Ode, 2006:90).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Hasnan Habib “organisasi militer untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat (emergency organization) yang bercirikan organisasi keras, ketat, hirarkis sentralistis, berdisiplin keras dan bergerak atas komando” (Cholisin, 2002:11).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua sifat prinsip itulah yang dikembangkan oleh militer untuk membebaskan NKRI dari segala bentuk pemberontakan dan separatisme seperti yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal, dimana 1/6 wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh pemberontak. Pertikaian antara pusat dan daerah yang acap kali terjadi pada sebuah negara merupakan satu sumber kekuatan dan dorongan bagi para jenderal militer untuk memasuki gelanggang politik. “Alasan utama bagi militer untuk melancarkan politik adalah kelahiran aktivitas politik dan produksi ekonomi masyarakat daerah terpencil yang berkembang di tengah-tengah masyarakat (Amos Perlmutter, 2000:249).

2.1.3 Konsep Keterlibatan Militer dalam Pemerintahan Soeharto

Menurut karangan Hasan Alwi, keterlibatan memiliki arti keadaan terlibat. Sedangkan Militer berarti : tentara : anggota tentara; ketentaraan. (Alex MA, 2005: 668)

Lalu, Pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara, atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara di segala badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara serta jawatan atau aparatur dalam susunan politik (<http://andiismailhamzah-duniakampus.blogspot.com/2012/04/definisi-pemerintah.html>).

Jadi berdasarkan pengertian diatas, keterlibatan militer dalam pemerintahan soeharto secara etimologi diartikan sebagai keadaan yang melibatkan tentara dalam suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara di segala badan-badan publik yang meliputi

kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara serta jawatan atau aparatur dalam susunan politik oleh Presiden Soeharto.

Akan tetapi, pengertian secara etimologi tersebut, belumlah cukup untuk menjelaskan konsep keterlibatan militer dalam pemerintahan Soeharto. Oleh karena itu, konsepsi tersebut harus juga di lihat dari berbagai aspek yang lain. Aspek pertama untuk menjelaskan konsep keterlibatan militer dalam pemerintahan Soeharto yaitu sebab-sebab keterlibatan militer dalam politik. Menurut Yahya A. Muhaimin, ada beberapa sebab yang mendorong militer secara aktif memasuki arena politik dan sistem politik dan memainkan peranan politik. Faktor-faktor ini lebih terletak pada kehidupan politik atau sistem politik, yaitu faktor diluar militer atau faktor eksternal

1. Adanya ketidakstabilan politik. Keadaan seperti itu akan menyebabkan terbukanya kesempatan dan peluang yang besar untuk menggunakan kekerasan di dalam kehidupan politik.
 2. Kemampuan golongan militer untuk mempengaruhi atmosfir kehidupan politik dan bahan untuk memperoleh peranan-peranan politik yang menentukan
 3. Peranan dan status militer di dalam masyarakat dan juga yang berkenaan dengan persepsi mereka terhadap kepemimpinan kaum sipil dan terhadap sistem politik secara keseluruhan.
- (Yahya A. muahaimin, 1992: 3)

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Amos Perlmutter, yang menyatakan bahwa keterlibatan militer dalam politik disebabkan oleh adanya konflik antara kelompok sosial dan inefektivitas institusi-institusi sehingga memicu krisis legitimasi politik :

1. Meningkatkan konflik-konflik antar partai politik dan antar kelompok-kelompok sosial

2. melemahnya efektivitas serta legitimasi institusi-institusi politik yang otonom, tidak berwibawa, mudah dibeli dan kurang mampu melaksanakan fungsinya di masyarakat.

(Amos Perlmutter, 2000: 249)

Selain sebab eksternal yang bersifat objektif, keterlibatan militer dalam politik juga disebabkan faktor internal yang bersifat subjektif. Menurut Yahya A. Muhaimin, sebab internal itu terdiri atas :

1. Militer mempunyai keyakinan bahwa eksistensinya di dalam negara mengemban tugas suci selaku juru selamat tanah airnya. pendirian ini timbul sebab mereka dibentuk dengan tugas selaku pertahanan negara.
2. Ada semacam kepercayaan pada golongan militer bahwa mereka memiliki identifikasi khusus yaitu identifikasi dengan kepentingan nasional. (Yahya A. Muhaimin,1992:6)

Aspek kedua mengenai konsep keterlibatan militer dalam politik yaitu model-model keterlibatan militer dalam politik. salah seorang pengamat militer terkemuka, S.E. Finer mengidentifikasi enam model intervensi militer :

(1) melalui saluran konstitusional yang resmi;(2) kolusi dan/atau kompetisi dengan otoritas sipil;(3) Intimidasi terhadap otoritas sipil;(4) ancaman nonkoperasi dengan, atau kekerasan terhadap otoritas sipil;(5) kegagalan untuk mempertahankan otoritas sipil menentang kekerasan;(6) penggunaan kekerasan terhadap otoritas sipil. (S.E.Finer, dalam, Indra Samego, et al. 1998:68)

Sejalan dengan model intervensi militer diatas, dominasi militer dalam pemerintahan politik dapat bermacam-macam tingkatnya. menurut Indra Samego et.al, pada tingkatan tertinggi militer dapat secara langsung mengambil alih kontrol pemerintah dan memonopoli posisi kunci di dalam pemerintahan. Pada tingkatan moderat, militer dapat pula menguasai posisi-posisi kunci dan pada saat yang bersamaan menyerahkan kementrian-kementrian lainnya, yang tidak dapat dikuasainya karena tidak memiliki kemampuan kepada kelompok sipil. Pada

tingkatan lain, militer dapat pula mengangkat seorang kepala negara/kepala pemerintahan dari golongan sipil. (S.E.Finer, dalam, Indra Samego, et al. 1998:68)

Konsep keterlibatan militer dalam pemerintahan dapat pula dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan militer dalam struktur politik. Menurut Mac Parling ada dua model struktur politik yaitu suprastruktur dan infranstruktur. Kedua model tersebut merupakan jalur atau saluran yang digunakan berbagai kekuatan politik dalam merealisasikan perjuangan politiknya.

Dalam struktur politik, terdapat dua model pokok yaitu pertama, suprastruktur yang terdiri atas lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, para menteri serta agen pemerintah. Kedua, infranstruktur yang terdiri atas partai politik, kelompok fungsional, figur-figur politik, dan kelompok-kelompok kepentingan. (Mac Parling, dalam Indra Samego, et. al 1988:36)

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa keterlibatan militer dalam pemerintahan Soeharto dapat terlibat secara langsung dan terlibat secara tidak langsung. Keterlibatan militer secara langsung dalam pemerintahan Soeharto berhubungan dengan adanya bahkan dominannya unsur militer dalam struktur lembaga pengambilan keputusan. Sedangkan keterlibatan secara tidak langsung berkaitan dengan kemampuan golongan militer dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam birokrasi,dan politik.

2.1.4 Konsep ABRI

Menurut A.S.S. Tambunan dalam Selo Soemardjan, ABRI adalah angkatan bersenjata yang lahir dan tumbuh dengan kesadaran untuk melahirkan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan. (Soemardjan, 199:7)

Sedangkan menurut A.H Nasution Pidato Dies Natalis Akademi Militer Nasional pada tahun 1958 dalam Soebijono dkk, bahwa yang dimaksud ABRI adalah : “Bahwa ABRI perlu ikut dalam pembinaan negara, karena kalau dibendung adalah laksana kawah gunung merapi, yang pasti dalam waktu akan meledak. Ia adalah sebagai kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu membahu dengan kekuatan rakyat lainnya “. (Soebijono dkk, 1992:86)

Dalam Soebijono dkk, Panglima Besar Jenderal Sudirman menegaskan mengenai apa, siapa, dan bagaimana ABRI, “ABRI lahir karena proklamasi 17 Agustus 1945, hidup dengan Proklamasi itu dan bersumpah mati-matian hendak mempertahankan kesucian proklamasi tersebut, satu-satunya hak milik nasional republik yang masih tetap utuh tidak berubah-ubah meskipun harus menghadapi segala soal perubahan, adalah hanya ABRI. Maka sebenarnya jadi kewajiban bagi kita sekalian, yang senantiasa hendak mempertahankan tegaknya proklamasi 17 Agustus 1945 untuk tetap memelihara, agar satu-satunya hak milik nasional yang masih utuh itu tidak berubah-ubah oleh keadaan bagaimanapun”.(Soebijono dkk, 1992:84-85)

Dan pada Orde Baru sesuai dengan keputusan presiden no 132/1967, maka ABRI terdiri atas :

- a. Angkatan Darat disingkat AD
- b. Angkatan Laut disingkat AL
- c. Angkatan Udara disingkat AU
- d. Angkatan Kepolisian disingkat AK, (Poesponegoro, Notosusanto, 1993:464)

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka ABRI adalah angkatan bersenjata yang ikut dalam pembinaan negara sebagai kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu membahu dalam mewujudkan, membela dan mengisi kemerdekaan serta mempertahankan kemurnian Proklamasi. Dan kemudian pada masa Orde Baru ABRI terdiri dari AD, AL,AU dan AK.

2.1.5 Konsep Dwifungsi ABRI

17

Dwifungsi ABRI menurut Soebijono ialah suatu konsep politik yang menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik dalam supra maupun infra struktur politik sekaligus (Soebijono, 1992:1)

Pengertian Dwifungsi ABRI yaitu sebagai penugasan tentara yang masih aktif dalam tugas non-militer, khususnya dalam lembaga-lembaga pemerintahan baik yang legeslatif (DPR, MPR) maupun eksekutif (dari lurah sampai menteri). (Soebijono, 1992:58)

Pengertian Dwifungsi ABRI menurut Soebiyanto dalam Muhammad Rusli Karim:

“Bahwa ABRI itu mempunyai 2 (dua) fungsi, ialah sebagai kekuatan HANKAM maka ABRI merupakan aparatur Negara/Pemerintah, ABRI menjalankan fungsi HANKAMNAS untuk mempertahankan dan mengamankan negara dan bangsa terhadap serangan/ancaman/bahaya yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam fungsinya sebagai kekuatan sosial ABRI merupakan salah satu golongan karya yang ikut secara aktif dalam segala usaha dan kegiatan masyarakat dan negara di semua bidang dalam rangka pencapaian tujuan Nasional” (Karim, 1991:59).

Sedangkan hakikat Dwifungsi ABRI adalah jiwa dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan rakyat lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik dibidang kesejahteraan nasional, maupun di bidang pertahanan keamanan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Notosusanto, 1994:170).

Jadi Dwifungsi ABRI adalah ABRI tidak hanya memiliki peran di bidang pertahanan dan keamanan saja tetapi ABRI juga memiliki peran di bidang sosial. Dimana peran sosial ABRI ini meliputi bidang-bidang lainnya seperti politik, ekonomi dan budaya. Dan Dwifungsi ABRI di Implementasikan dengan dikaryakan ABRI diluar bidang hankam khususnya di Birokrasi pemerintahan.

2.1.6 Konsep Awal Orde Baru

18

Sesuai dengan ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai Presiden ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 tahun (1968-1973) dan dilantik pada tanggal 27 Maret 1968. Menurut ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 kabinet yang harus dibentuk adalah Kabinet Pembangunan. Dengan ketetapan tersebut otomatis Kabinet Ampera harus dimissioner, diganti kabinet baru yang sudah diberi nama Kabinet Pembangunan. Sebagai realisasi terhadap Kabinet Pembangunan adalah tanggal 6 Juni 1968 susunan Menteri Kabinet Pembangunan terbentuk dan diumumkan. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juni 1968. Kabinet ini merupakan Kabinet Presidensial sebagaimana kabinet lain sejak kita kembali ke UUD 1945 (Bibit Suprpto, 1985:341).

Dalam negara yang bersistem Kabinet Presidensial, dimissionernya kabinet karena adanya reformasi kabinet (Regrouping Kabinet Zaman Orde Lama) atau Reshuffle kabinet secara keseluruhan untuk semua menteri dalam kabinet, walaupun kabinet sebenarnya masih mampu memerintah. Seperti halnya Kabinet Pembangunan I dimissioner ketika Kabinet Pembangunan II terbentuk/diumumkan tanggal 27 Maret 1973 tepat pukul 19.20 WIB dan dilantik pada esok harinya tanggal 28 Maret 1973 (Bibit Suprpto, 1985:360-361).

Dari kutipan di atas penulis menyimpulkan bahwa Pelita I dan II termasuk dari awal Orde Baru, karena pada awal Orde Baru itu lah dan pada saat Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden tahun 1968, dan pada saat itu juga Kabinet Pembangunan I di bentuk dan dilantik pada 6 Juni 1968 kemudian berkesinambungan dengan Kabinet Pembangunan II.

2.1.7 Konsep Birokrasi

19

Terminologi Birokrasi dalam literatur Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu politik sering dipergunakan dalam beberapa pengertian. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pengertian yang sering terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu:

- 1) Organisasi yang rasional, 2) Ketidakefisienan organisasi, 3) Pemerintahan oleh para pejabat, 4) Administrasi Negara, 5) Administrasi oleh pejabat, 6) Bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti hirarki dan peraturan-peraturan, 7) Salah satu ciri yang esensial dari masyarakat modern (Arifin Ramlan, 1998:136).

Dalam tahap baru ini timbul kesan, bahwa Birokrasi pemerintah akan ditata menyerupai apa yang oleh Max Weber disebut “legal-rasional” yang ditandai oleh:

- (a), Tingkat spesialis yang tinggi. (b), Struktur kewenangan hirarkis dengan batas-batas kewenangan yang jelas. (c), Hubungan antar anggota organisasi yang tidak bersifat pribadi. (d), Rekrutmen yang didasarkan atas kemampuan teknis. (e), Diferensiasi antara pendapatan resmi dan pribadi. Kualitas ini ingin dicapai melalui pengaturan struktural seperti hirarki kewenangan, pembagian kerja, profesionalisme, tata kerja, dan sistem perubahan yang kesemuanya berlandaskan peraturan-peraturan (Priyo Budi Santoso, 1997: 2-13).

Dalam pengertian netral birokrasi diartikan sebagai “Keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif, atau birokrasi bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang bersekala besar”.

Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah lembaga departemen dan lembaga non-departemen, baik ditingkat pusat maupun daerah, seperti propinsi, kabupaten dan kecamatan, bahkan tingkat kelurahan atau desa (<http://massofa.wordpress.com>).

Sehingga dapat disimpulkan birokrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah

di bawah lembaga departemen maupun no-departemen baik ditingkat pusat maupun di daerah.

2.2 Kerangka Pikir

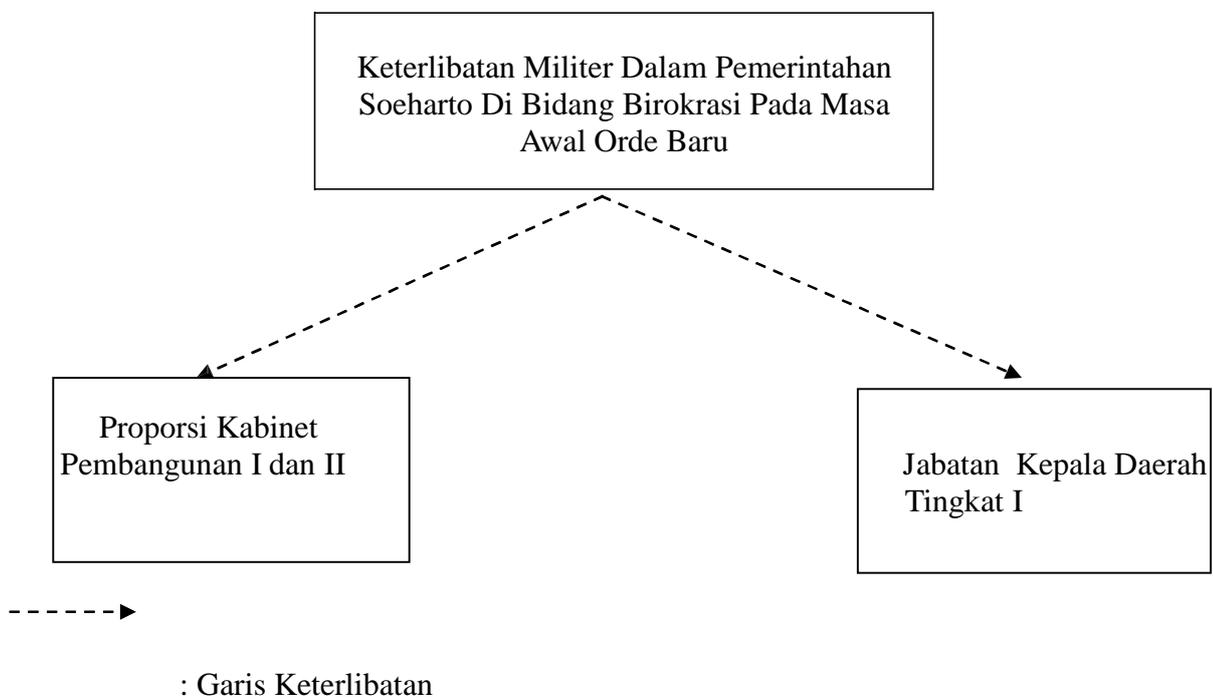
Pada masa awal Orde Baru keterlibatan militer secara aktif bertujuan untuk memulihkan krisis nasional yang terjadi akibat pemberontakan G30-S/PKI karena pada saat itu kondisi atau situasi politik di Indonesia tidak menentu dan terjadi krisis ekonomi, sehingga militer turut serta dalam usaha mempertahankan dan mengisi pembangunan bangsa sehingga keterlibatan militer dalam fungsinya sebagai kekuatan sosial politik dalam upaya membangun bangsa bukan untuk memperoleh jabatan diluar bidangnya atau jabatan sipil, namun seiring dengan berjalannya waktu keterlibatan militer dibidang birokrasi terlihat dimana banyaknya anggota militer yang dikaryakan di dalam menteri kabinet pembangunan I pada tahun 1968-1973 dan pembangunan II pada tahun 1973-1978, serta terdapat beberapa anggota militer yang dikaryakan dalam kepala daerah tingkat I.

Maka, dengan adanya keterlibatan militer dalam sosial politik pada masa awal orde baru diterapkannya militer diluar bidang Hankam, sehingga memberikan peluang bagi anggota militer untuk memangku jabatan sipil tanpa meninggalkan statusnya sebagai anggota militer. Dan tidak bisa dihindari dengan adanya keterlibatan militer di lembaga-lembaga pemerintah khususnya di bidang

birokrasi, dapat dilihat dengan banyaknya jumlah anggota militer pada masa awal orde baru baik anggota militer yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif di tempatkan pada birokrasi pemerintah, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah, seperti propinsi, kabupaten dan kecamatan, bahkan pada tingkat kelurahan atau desa.

Dan Penerapan Dwifungsi ABRI dipemerintahan pada masa awal Orde Baru berakibat pada di tempatkannya anggota ABRI di departemen dalam negeri dan pejabat non-departemen. Dengan adanya Dwifungsi ini maka pelaksanaannya disegala bidang menjadi acuan para anggota ABRI untuk ikut serta di pemerintahan fungsinya disegala bidang.

2.5 Paradigma



REFERENSI

[http.wikipedia.org/wiki/sejarah/11-08-2013](http://wikipedia.org/wiki/sejarah/11-08-2013)

Mohammad Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Medan. Halaman 48

Hugiono, dkk. 1992. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Rineka Cipta. Semarang. Halaman 2

Nugroho Notosusanto. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Intidayu Press : Jakarta. Halaman 17

Amos, Perlmutter. 2000. *Militer dan Politik*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Abdul Fattah. 2005. *Demilitarisasi Tentara: Pasang surut politik Militer 1945-2004*, Yogyakarta

M.D.La Ode. 2006. *Peran Militer dalam Ketahanan Nasional* (studi kasus bidang Hankam Indonesia 1967-2000). Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Ibid, Hal 90

Cholisin. 2002. *Militer dan Gerakan Prademokrasi*. Tirawencana Yogya. Yogyakarta

Amos Perlmutter, Op Cit. Halaman 24

Alex MA. 2005. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, Karya Harapan. Surabaya. Halaman 668

[http://andiismailhamzah-duniakampus.blogspot.com/2012/04/definisi pemerintahan.html](http://andiismailhamzah-duniakampus.blogspot.com/2012/04/definisi-pemerintahan.html). Di Akses Pada 21 september 2013, Pukul 21:05 WIB

Yahya A. muahaimin. 1992. *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta . Halaman 3

Amos Perlmutter. 2000. *Militer dan Politik*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta Halaman 249

Yahya A. Muhaimin, Op cit. hal 6

S.E.Finer, dalam, Indra Samego, et al. 1998. *Desakan kuat Reformasi Atas Konsep ABRI*. Mizan. Bandung. Halaman 68

Ibid, Hal.68

Mac Parling, dalam Indra Samego, et. al, Ibid, hal 36

Selo Soemardjan, 1999. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Pusat Sinar Harapan.
Jakarta. halaman 7

Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka. Jakarta. Halaman 464

Soebijono, dkk. 1992. *Dwifungsi ABRI*. Gajah Mada University Press.
Yogyakarta. Halaman 86

Ibid, Halaman 84-85

Ibid, Halaman 1

Ibid, Halaman 58

Muhammad Rusli Karim. 1983. *Peranan ABRI Dalam Politik*. Yayasan Idayu.
Jakarta. Halaman 59

Nugroho Notosusanto. 1994. *Pejuang dan Prajurit*. Pustaka Sinar Harapan Ikapi.
Jakarta. Halaman 170

Bibit Suprpto, 1985. *Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan Di Indonesia*. Ghalia
Indonesia, Jakarta Halaman 341

Ibid. hal 360-361

Arifin Ramlan, 1998. *Sistem Politik Indonesia*. SIC. Jakarta. Halaman 136

Priyo Budy Susanto, 1997. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru: Persepektif Kultural dan Struktural*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Halaman 2

<http://massofa.wordpress.com>. Diakses pada 20 April 2013, Pukul 13:01